PAPER

PANEL 1. REFORMASI POLITIK DAN PEMULIHAN KEDAULATAN RAKYAT

Ideologi Neoliberalisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia

Oleh Airlangga Pribadi
Staf Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga

"Cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian negeri, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mupakat. Pendek kata, rakyat itu daulat alias raja atas dirinya. Tidak lagi orang seorang atau sekumpul orang pandai atau satu golongan kecil saja yang memutuskan nasib rakyat dan bangsa, melainkan rakyat sendiri. Inilah suatu dasar demokrasi atau kerakyatan yang seluas-luasnya. Tidak saja dalam hal politik melainkan juga dalam hal ekonomi dan sosial ada demokrasi: keputusan dengan mupakat rakyat yang banyak".

Muhammad Hatta, Ke Arah Indonesia Merdeka (Daulat Ra'jat 1931).

"Jika kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencinta rakyat Indonesia, marilah kita terima *sociale rechtvardigheid* ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang akan kita buat hendaknya bukan politieke democratie saja tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: *politieke rechtvaardigheid* dan *sociale rechtvaardigheid*."

Soekarno, Lahirnya Pancasila (1945).

"Indonesia lahir dengan penentangan kolonialisme yang sering dikaitkan dengan kapitalisme, liberalisme, dan sebagainya. Para pendiri negara kita banyak terdiri dari kaum sosialis-nasionalis, itu produk sejarah yang unik pada awal dan pertangahan abad ke-20. Kalau Indonesia lahir pada abad ke-21 tentunya akan berbeda, tetapi kebanyakan negara dunia ketiga lahir pada pertengahan abad ke20, di mana HAM, liberalisme, sedang didiskreditkan di beberapa belahan dunia. Jadi, memang agak sedih juga jika kita melihat hal itu. Tetapi, itu adalah masa lalu, pada masa sekarang justru trennya, arahnya,

kecenderungannya sudah berbalik. Mau tidak mau, sekarang ini kita dipaksa untuk menjadi semakin liberal".

Rizal Mallarangeng, Demokrasi dan Liberalisme (Forum Freedom 2005).

Melampaui perspektif kekinian, dalam bentangan sejarah yang panjang selama rentang waktu hampir satu abad, ada hal yang menarik ketika mensejajarkan perbincangan dalam politik demokrasi Indonesia pada saat akhir pemerintahan kolonial dan awal kemerdekaan dengan yang berlangsung di fajar abad ke-21, saat demokrasi mulai tumbuh ditengah tidur lelapnya yang panjang dibawah tirani rezime Soeharto. Kesejajaran (*diachronic*) yang tampak jelas antara era paruh awal abad ke-20 dengan era politik reformasi adalah istilah "demokrasi" terutama pada level kesadaran diskursif menjadi term hegemonik dalam ruang publik. Pada paruh awal abad ke-20 ada konsensus yang hampir disepakati bersama bahwa demokrasi menjadi jalan politik bagi masa depan republik yang masih muda (Feith 1962; Latif 2007). Hal ini terjadi pula dalam perbincangan ruang publik kita sekarang. Term "demokrasi" dengan penguatan lembaga-lembaga politiknya menjadi kesepakatan diantara aktor-aktor politik strategis untuk ditempuh, dipelihara, dan dirawat bagi masa depan Indonesia.

Di sisi lain ada perbedaan dan partikularitas (*synchronic*) yang menandai batas antara paruh awal abad ke-20 dengan era reformasi ketika memaknai demokrasi. Pada paruh awal abad ke-20 istilah demokrasi diucapkan dalam satu tarikan nafas dengan kesejahteraan umum, keadilan sosial dan pelibatan peran partisipatoris rakyat yang intens dalam proses-proses pengelolaan negara baik dalam wilayah ekonomi maupun politik. Tumbuhnya "demokrasi" dalam kesadaran diskursif dipenuhi oleh ide tentang ikatan solidaritas kolektif untuk merdeka, pentingnya partisipasi politik rakyat, keberjarakan dengan sistem ekonomi kapitalisme, dan pentingnya peran aktif negara tidak saja dalam wilayah politik namun juga sosial ekonomi untuk memenuhi hajat hidup warganegaranya (Soekarno 1945; Hatta 1931; Tjokroaminoto 1916).

Muatan dari term "demokrasi" diawal republik ini berdiri tidak saja berbeda namun juga kontradiktif dengan narasi utama "demokrasi" di Indonesia di era reformasi. Pasca kejatuhan rezime otoritarianisme Soeharto, fondasi demokrasi pertama-tama dibangun atas fondasi kebebasan individual, pembedaan ruang publik dan privat disertai perluasan ruang privat pada wilayah sosial ekonomi, hal itu berjalan seiring dengan pelepasan peran-peran aktif negara di wilayah sosial ekonomi, gairah yang intim untuk terintegrasi dengan rezime global pasar bebas, dan pemutusan pemahaman akan demokrasi dari korespondensinya dengan keadilan sosial dan partisipasi intens warganegara. Perbincangan tentang demokrasi kemudian berubah sebagai sebuah prosedur dan cara untuk memilih pemimpin yang legitimatif dihadapan publik melalui proses pemilu disertai dengan pemenuhan hak-hak politik dan sipil dari warganegara (Rizal Mallarangeng 2005; William Liddle 2006).

Sosialisme sebagai Basis Konstruksi Demokrasi Indonesia Era Pergerakan Nasional

Tarikan-tarikan kekuatan ekonomi-politik global dalam konteks historis yang khas dan pengetahuan dominan yang melingkari semesta pembicaraan dari komunitas epistemik antara generasi yang berbeda kesemuanya membentuk terjadinya kesejajaran (diachronik) dan perbedaan (synchronic) dari dua fase sejarah Indonesia tersebut. Kaum intelegensia

Indonesia paska kolonialisme--yang kuat sekali terasa dalam fikiran-fikiran Soekarno, Tan Malaka dan Muhammad Hatta-- diliputi oleh gairah dan fikiran yang kuat untuk lepas dari belenggu kolonialisme dan rantai kapitalisme yang eksploitatif dengan mengadopsi ide marxisme maupun sosialisme demokrasi.

Seperti diutarakan oleh Edward Shills (1960) keterlibatan yang intens kaum intelegensia masyarakat jajahan (termasuk Indonesia-pen.) terhadap gagasan sosialisme dan kesetaraan demokratis terjadi bersamaan dengan bergeloranya pemikiran sosialistik dalam ruang publik intelektual Eropa pada awal abad ke-20. Hal ini bertepatan dengan arus gelombang besar perpindahan kaum intelegensia negeri terjajah untuk menuntut ilmu di negara-negara Eropa yang dimulai pada tahun 1890-an kemudian semakin intens pada tahun 1920-an dan memuncak pada pasca tahun 1945. Peristiwa-peristiwa global seperti suksesnya revolusi Leninis di Rusia dan menguatnya partai-partai buruh berideologi sosialisme-demokratis di Eropa turut memperkuat semangat tersebut.

Pada saat sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 menurut Sheri Berman (2006: 32) dalam karyanya *The Primacy of Politics: Social Democracy and The Making of Europe,* bahwa keyakinan akan pengaruh sosialisme dalam tatanan politik republik demokratik begitu menguat di Eropa. Secara menarik Berman mengutip uraian dari Jean Jaures--politisi kiri utama Prancis yang kerapkali dikutip oleh Soekarno--bahwa republik demokratik tidak murni berkarakter borjuis, namun ia dipersiapkan menuju sosialisme, dalam proses evolusi politik, apabila dibiarkan berjalan tanpa keterputusan, akan membawa jalan politik republik menuju sosialisme. Transformasi politik republik demokrasi menuju sosialisme bagi Jaures, memberikan *The Right of Man* pemenuhan makna-makna fundamentalnya. Dalam tarikan kontestasi politik kelas di level internasional, seiring dengan depresi global pada tahun 1929 terjadi proses penguatan artikulasi politik kelas-kelas popular pada arus utama politik formal di Eropa yang berpuncak pada kompromi kelas antara kekuatan borjuasi dan buruh. (Berman 2006, 6; Huber, Rueschmeyer, Stephens 1997, 323-326).

Sirkulasi ide-ide demokrasi-sosialistik sebagai gagasan utama di Eropa pada awal abad ke-20 telah memberi eksposure pada komunitas epistemik intelektual negara terbelakang--termasuk intelegensia Indonesia yang sekolah di negeri Belanda--untuk mengartikulasikan gagasan demokrasi yang sarat dengan nafas sosialistik. Hal ini ditandai oleh lahirnya kelompok studi mahasiswa Indonesia di negeri Belanda yaitu tampilnya tokoh pergerakan legendaris kiri hasil didikan edukasi di Belanda yaitu Tan Malaka dan Perhimpoenan Indonesia (Indonesische Vereeniging) pada tahun 1922-1923 yang melahirkan tokoh-tokohnya seperti Soetan Sjahrir dan Muhammad Hatta dan menggulirkan ide non-kooperasi, kemandirian nasional dan politik partisipatoris rakyat dalam mencapai kemerdekaan (Dhont 2005; 30-31, 54).

Kecenderungan yang berlangsung di ruang transnasional pendidikan ini sejalan dengan perluasan dalam kesempatan belajar di Hindia Belanda pasca kebijakan politik etis. Kemunculan sekolah-sekolah di Hindia Belanda sebagai produk politik etis yang melayani kebutuhan birokrasi dan pekerjaan khusus rezime kolonial seperti Sekolah Amtenar Bumiputera (OSVIA), Sekolah Dokter Jawa (STOVIA), Sekolah Hukum (Rechtschool) dan Sekolah Tinggi Tekhnik (THS) memproduksi elite-elite terpelajar bumiputera yang berpartisipasi dan membentuk-apa yang diistilahkan oleh Hildred Geertz (1963) sebagai—superkultur metropolitan Indonesia (*Indonesian metropolitan superculture*). Ditengah

keterlibatan yang intens elite-elite terpelajar kaum muda terhadap cakrawala pengetahuan Barat, pada sisi lain mereka merasakan diskriminasi sosial ketika posisi-posisi penting dalam dunia pemerintahan lebih banyak diberikan kepada orang-orang Belanda maupun Indo-Eropa.

Sentimen ketimpangan sosial ini mendorong politisasi yang kuat dari kalangan elite terpelajar untuk terlibat intens dengan kesengsaraan dan posisi subalternitas dari kaum rakyat bumiputera. Himpitan dan diskriminasi dalam wilayah sosial ini mempengaruhi formasi pembentukan identitas subaltern bumiputera melalui produksi wacana-wacana populis-nasionalistik dalam konstruksi gagasan demokrasi yang mereka gulirkan. Intensitas politik nasionalisme populis di Indonesia ini diperkuat oleh tampilnya kelompok-kelompok studi di kota-kota sekolah tinggi di Indonesia seperti Indonesische Studieclub yang terinspirasi oleh ide dari Tjokroaminoto dan Soetomo serta Algeemeene Studieclub yang didirikan di Bandung dengan tokohnya Soekarno dan Soenario (pelopor partai politik PNI).

Seiring dengan politisasi dan afiliasi kalangan kaum intelektual bumiputera terhadap artikulasi politik kerakyatan, kode-kode politik baru seperti merdeka, revolusi dan rakyat menjadi kosa kata umum dalam ruang publik intelektual Indonesia semenjak masa pergerakan nasional (Legge 2003, 32-33; Hildred Geertz 1963; 35, Lane 2007; Latif 2005). Tidaklah mengherankan dalam intensitas perlawanan kaum intelektual yang begitu kuat terhadap imperialisme dan kolonialisme terbentuklah konstruksi wacana demokrasi--yang dekat dengan perspektif sosialistik--dengan memaknai demokrasi sebagai proyek pembebasan dan aktivasi kekuatan rakyat secara intens dalam arena politik untuk melakukan politik *reclaiming* dari kuasa kolonialisme yang berbasis pada semangat kolektivitas dan solidaritas rakyat dalam memaknai dunia politik.

Era Neoliberalisme dan Perputusan dengan Tradisi Pergerakan Nasional

Apabila dominasi gagasan Marxisme dan sosial-demokratik, menjadi bagian dari narasi dominan yang membentuk pembicaraan tentang demokrasi di Indonesia pada paruh awal abad ke-20; konteks partikularitas historis dan regangan relasi kuasa pengetahuan dan perimbangan kelas yang membentuk pemaknaan tentang demokrasi di era reformasi ini memiliki penjelasannya yang tidak saja berbeda namun juga merupakan *counter movement* dari arus gelombang sejarah sebelumnya.

Beberapa klaim-klaim "kebenaran utama" dalam perbincangan demokrasi yang memperkuat operasi rezime demokrasi liberal-pasar di era reformasi telah menggantikan wacana demokrasi politik dan keadilan sosial sebagai imperatif demokrasi pada masa pergerakan nasional. Perluasan rezime pasar bebas yang mendorong proses demokrasi, pembatasan seluas-luasnya terhadap peran sosial ekonomi negara dalam rezime demokratik yang sejalan dengan pemisahan pengelolaan antara arena politik dan ekonomi, kebebasan dan otonomi individu sebagai nilai dasar demokrasi seiring dengan dosis yang tinggi terhadap kebebasan sipil dan politik serta pengurangan hak-hak ekonomi dan sosial, serta pemahaman demokrasi yang terbatas pada memilih pemimpin yang legitimatif dihadapan rakyat melalui mekanisme pemilu. Kesemua asumsi-asumsi tersebut merupakan indikasi yang sangat kuat bagaimana rezime politik demokrasi-pasar bebas beserta kesadaan diskursifnya bekerja dalam gerakan ganda (*double movement*) untuk memperlancar jalan ekspansi pasar bebas dan melakukan kontrol sosial dan pendisiplinan

terhadap partisipasi politik rakyat dan jalan-jalan demokratik alternatif diluar mainstream utama demokrasi pasar bebas (Polanyi 1957; Munck 2002; 10).

Pensejajaran demokrasi liberal dan pasar bebas sebagai rezime pengetahuan utama di Indonesia era reformasi--sebagai imbas dari konsensus ekonomi politik global pasca perang dingin--tidak dapat dilepaskan rentetannya dari tampilnya wacana tentang pasar bebas sebagai kritik dan alternatif pengetahuan terhadap berbagai model aktivasi negara yang mulai berkembang dalam ruang publik intelektual sejak Orde Baru. Untuk kasus Indonesia landasan historis dari difusi pengetahuan pasar bebas ini dapat ditelusuri dari program pendidikan pengiriman mahasiswa FE-UI yang dilakukan sejak era tahun 1950-an yang diinisiasi oleh Prof. Sumitro Djohjohadikusumo melalui Ford Foundation ke Amerika Serikat.

Pada tahun 1965 bertepatan dengan perubahan rezime politik di Indonesia, 47 sarjana lulusan FE-UI diberi beasiswa untuk melakukan studi di Universitas California Berkeley dan Universitas Chicago. Pada waktu yang bersamaan dengan pengiriman studi sarjana lulusan FE-UI ke AS, di Amerika Serikat dan Eropa tengah menguat kritik terhadap kompromi antara kapital dan kekuatan politik arus bawah di universitas dan lembaga-lembaga riset yang diinisiasi oleh pengetahuan neoliberalisme. Melalui support dari kaum elite kelas atas dan korporasi privat, neoliberalisme menyemaikan pengetahuannya dan membentuk komunitas epistemik melalui berbagai lembaga riset seperti Institute of Economic Affairs dan Centre for Policy Studies di Inggris serta The Heritage Foundation dan International Centre for Economi Policy Studies di AS. Lembaga-lembaga riset itulah yang selanjutnya menjadi pemasok gagasan dari rezime neoliberal di Inggris yang diawali semenjak pemerintahan Margareth Thatcher dan di Amerika Serikat dibawah Presiden Ronald Reagan (Irwan 2005: 40; Mayo 2005; 18-19).

Sebagai sebuah gagasan yang dirumuskan oleh beberapa intelektual seperti Friederich von Hayek, Ludwig von Moses, Milton Friedman, neoliberalisme hadir untuk menjawab ancaman rezime politik korporatis dan negara kesejahteraan yang menekankan pada semangat kolektivitas yang mereka anggap mengancam nilai-nilai fundamental peradaban Barat yaitu kebebasan manusia dan otonomi individual. Bagi kaum neoliberal langkah kompromi antara kapital dan kelas popular, peran aktif negara yang membentuk tatanan politik kolektif, merupakan ancaman terhadap demokrasi, pasar bebas dan kebebasan ummat manusia. Seperti diutarakan oleh pelopornya Freidrich von Hayek dalam karyanya *The Constitution of Liberty* bahwa warisan tertinggi peradaban Barat yaitu kebebasan dan otonomi individual tengah berhadapan dengan lawan-lawannya yang bukan saja berasal dari ideologi marxisme, namun juga sosialisme, maupun model perencanaan negara ala Keynesian.

Jawaban terhadap ancaman bagi peradaban manusia ini adalah jaminan atas kebebasan individu dan pembatasan peran-peran negara dalam arena pasar seiring dengan perlindungan negara bahkan dengan kekuatan koersif yang dimilikinya terhadap hak milik privat, kebebasan individu, dan kebebasan untuk mengejar kepentingan diri di arena ekonomi. Terkait dengan pertanyaan kondisi struktural dan kontestasi ekonomi-politik apakah yang menghantarkan pengetahuan neoliberalisme sebagai pengetahuan utama yang tidak saja tampil sebagai gagasan dominan di level kesadaran diskursif namun juga dalam praktik pengelolaan kebijakan ekonomi-politik negara dan rezime dominan di era

globalisasi pasca tahun 1970-an, ada beberapa penjelasan ekonomi-politik global yang patut dipertimbangkan.

Pengetahuan neoliberalisme ini tidak saja menjadi model alternatif pengetahuan baru dalam pengelolaan negara di negara-negara maju namun juga menyebar di negara-negara berkembang. Apabila pada masa-masa setelah Perang Dunia II mereka mengadopsi kebijakan substitusi import serta proteksi terhadap ekonomi domestik, maka setelah krisis *oil shock* ditahun 1970-an dan melemahnya perekonomian mereka akibat turunnya nilai jual produk-produk primer, pertanian dan sumber daya alam, serta krisis anggaran dan hutang luar negeri, negara-negara berkembang harus mengubah orientasi pembangunan mereka. Momentum krisis inilah yang memberi kesempatan pada lembaga institusi keuangan internasional atau World Bank dan IMF untuk mendorong negara berkembang untuk mereformasi perekonomian mereka dan mengadopsi kebijakan-kebijakan pro-pasar melalui *Structural Adjustment Program* (SAP). Program-program reformasi ekonomi inilah yang kemudian terumuskan dalam sepuluh ketentuan Washington Consensus yang meliputi (1) pengetatan fiskal; (2) Pengurangan alokasi anggaran untuk sektor publik untuk dialihkan ke sektor yang mendorong keuntungan; (3) Reformasi perpajakan yang ranah kelompok pro-bisnis; (4) liberalisasi nilai suku bunga; (5) penerapan nilai tukar yang kompetitif; (6) liberalisasi perdagangan; (7) liberalisasi investasi asing (8) Privatisasi; (9) Deregulasi; (10) jaminan kepemilikan publik (Hadi, Sitepu et.al 2007; 21-22).

Singkatnya reformasi ekonomi yang tertuang dalam Washington Consensus yang pada awalnya direkomendasikan untuk pemulihan ekonomi di Amerika Latin dan menyebar ke berbagai negara-negara berkembang ini, berusaha untuk memperluas ekspansi dan otoritas pasar dan membatasi peran-peran negara sampai tidak memberikan ruang yang cukup bagi negara untuk menjamin hak-hak ekonomi dan sosial dari warganya. Pengetahuan neoliberalisme yang termanifes pada turunannya dalam Washington Consensus inilah yang menjadi rezime pengetahuan utama dalam universitas-universitas, lembaga riset strategis yang memproduksi wacana ekonomi pasar di Indonesia.

Terkait dengan analisis kontestasi kelas yang berlangsung pada saat neoliberalisme tampil menjadi pengetahuan hegemonik dalam tata kelola pemerintahan global, David Harvey (2005) dalam karyanya *A Brief History of Neoliberalism* memberikan analisis yang menarik. Menurut Harvey jawaban dari pertanyaan mengapa neoliberalisme tampil menjadi alternatif gagasan utama dibandingkan dengan alternatif lainnya (*euro-communism*, ekonomi pasar sosial, penguatan negara kesejahteraan) sebagai tawaran terhadap krisis ekonomi-politik global pada tahun 1970-an, tidak dapat dilepaskan dari kontestasi ekonomi-politik dunia berbasis analisis kelas.

Menurut Harvey, dominasi mazhab Keynesian dan sosialisme demokratik dalam pengelolaan negara selama tiga dekade Pasca Perang Dunia ke-2 perlahan-lahan mengancam posisi ekonomi-politik dari kelas ekonomi dan elite kekuasaan. Tampilnya rezime negara kesejahteraan sebagai wacana dominan telah mengurangi secara signifikan pendapatan ekonomi yang diterima oleh kelas borjuis atas di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Sebagai contoh di Amerika Serikat selama tiga dekade pasca Perang Dunia ke-2 pembagian pendapatan nasional yang diperoleh 1% dari kelas elite ekonomi terkaya turun drastis dari 16% menjadi 8% pada era pasca Perang Dunia ke-2 dan terus berlangsung dalam tingkat yang relatif stabil sampai sekitar tahun 1960-an. Ketika tingkat suku bunga negatif dan keuntungan serta pembagian deviden ekonomi semakin mengecil,

maka indikasi-indikasi ekonomi tersebut menjadi ancaman bagi posisi ekonomi-politik dari kelas-kelas elite. Kondisi segera berubah setelah implementasi kebijakan neoliberal pada era akhir tahun 1970-an. Pendapatan 1% penduduk terkaya di Amerika Serikat melesat drastis sampai 15% dari pendapatan nasional. 0,1 % dari penduduk terkaya mendapatkan keuntungan besar dari 2% dari pendapatan nasional pada tahun 1978 melejit sampai 6% pada tahun 1999.

Kondisi demikian juga berlangsung di negara-negara Eropa lainnya seperti Inggris. Seiring dengan implementasi neoliberalisme (Pengurangan besar-besaran peran sosial negara dan ekspansi pasar bebas) pasca krisis dunia tahun 1970-an (setelah sebelumnya diimpelementasikan terlebih dahulu dengan menggulingkan eksperimentasi sosialisme di Chile yang dijalankan dibawah pemerintahan demokratis Salvador Allende) pembagian pendapatan nasional yang diperoleh 1% dari elite kelas ekonomi atas melonjak di Amerika Serikat naik 15% sampai akhir abad ke-20 dan di Inggris naik dari 6,5% menuju 13% sejak tahun 1982. Fakta-fakta ekonomi ini memperlihatkan bahwa neoliberalisme bukan saja pengetahuan untuk rekomendasi kebijakan namun lebih jauh lagi merupakan ideologi hegemonik yang melayani kepentingan kelompok-kelompok elite ekonomi borjuis dan mengembalikan posisi ekonomi politik dari kelompok-kelompok tersebut. Setelah berhasil sebagai ideologi dominan dan melayani kepentingan kelas elite dominan semenjak pemerintahan Amerika Serikat setelah Reagen dan Thatcher berkuasa secara bertahap paradigma neoliberal selanjutnya diadopsi oleh lembaga-lembaga keuangan internasional Bank Dunia dan IMF serta semakin kuat berperan melalui rezime pengetahuan yang digulirkan oleh organisasi perdagangan dunia WTO (Harvey 2005; 15-17; Dumenil, Levy 2004; 41-63).

Kembali pada konteks dinamika ekonomi-politik internal Indonesia pada waktu itu, sebagai bagian dari negara berkembang yang terpengaruh oleh konstelasi ekonomi-politik internasional, perubahan ekonomi politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pergeseran transformasi besar yang tengah berlangsung. Pergeseran dari desain ekonomi politik sosialistis menuju perluasan ekonomi pasar berlangsung semenjak pertengahan tahun 1960-an seiring pergantian kekuasaan dari rezime Sokarno menuju rezime Soeharto merupakan pre-teks dari transformasi menuju ekonomi pasar di Indonesia.

Perubahan menuju integrasi pasar bebas melalui paradigma neoliberalisme di Indonesia memang tidak seperti perubahan yang berlangsung di Barat maupun di negara-negara berkembang seperti di Amerika Latin. Namun demikian perlahan tapi pasti jalan menuju ekonomi pasar bebas di Indonesia sangat terkait dengan resistensi ideologis yang dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam oleh para ekonom-ekonom seperti Sumitro Djojohadikusumo, Muhammad Sadli dan Widjojo Nitisastro semenjak pertengahan tahun 1950-an.

Ditengah kontestasi ideologis antara sosialisme dan kapitalisme di Indonesia, dukungan Amerika Serikat terhadap ekonom yang menolak jalan sosialisme Soekarno terlihat dengan bantuan untuk beasiswa semenjak tahun 1956 dengan perantara Sumitro Djojohadikusumo, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia melalui Ford Foundation untuk studi mahasiswa-mahasiswa ke Universitas California Berkeley. Dalam posisi konfrontatif dengan kebijakan Soekarno, jaring-jaring intelektual ekonom liberal ini melakukan penyebaran gagasan dikalangan tentara Angkatan Darat melalui difusi gagasan-gagasan ekonomi liberal dalam kurikulum pendidikan SESKOAD Bandung sejak tahun

1958. Setelah kudeta politik merangkak yang dilakukan terhadap rezime Soekarno dan pembersihan yang dilakukan terhadap kekuatan politik kira PKI pada tahun 1965-1966 oleh militer, kalangan intelektual ekonom UI inilah yang menjadi salah satu think-thank utama dalam kebijakan ekonomi dari Pemerintahan Soeharto (Irwan 2005; 42).

Perubahan dari jalan ekonomi terpimpin menuju ekonomi pasar di Indonesia secara historis tidak bisa dilepaskan dari dinamika kontestasi pertarungan kelas yang begitu kuat--seperti yang telah dijelaskan--berlangsung di Amerika Serikat dan Inggris maupun negara Amerika Latin di Chili. Dukungan Amerika Serikat terhadap jejaring komunitas epistemik akademisi anti-populis, kekuatan militer terutama Angkatan Darat dan elite sosial ekonomi atas untuk mengkritik kebijakan "ekonomi terpimpin" Soekarno berlangsung saat terjadinya perjuangan gerakan ekonomi politik dari kelas-kelas popular Indonesia untuk mengikis model dual ekonomi pasca kolonial warisan Belanda.

Seiring dengan intensitas program nasionalisasi ekonomi dan politik kemandirian yang berjalan melalui pembatalan 85% utang Indonesia kepada Belanda (yang disetujui dalam KMB tahun 1949), penolakan terhadap bantuan Bank Dunia pada tahun 1962, tekanan renegosiasi kontrak dengan korporasi minyak AS yang dilakukan Soekarno, dan tuntutan gerakan buruh untuk terlibat dalam dewan manajemen perusahaan yang dinasionalisasi (pada saat itu tentara menikmati posisi istimewa sebagai elite manajerial diperusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi) membuat kalangan elite tentara yang memiliki akses pada sirkulasi produksi, akademisi pro-pasar dan kekuatan-kekuatan politik pro-AS merasa terancam kepentingannya. Momentum restorasi posisi ekonomi-politik kekuatan-kekuatan kelas elite atas yang anti kebijakan populis Soekarno, terjadi seiring dengan krisis ekonomi-politik ketika pemerintah dan kekuatan politik popular tidak mampu mengontrol akses ekonomi produktif dan manuver politik perebutan kekuasaan. Pada momentum inilah Jenderal Soeharto pada Oktober 1965 yang menandai kontra revolusi nasional Indonesia dan dimulainya pembukaan terhadap investasi asing dan eksploitasi energi di Indonesia oleh kekuatan kapitalisme internasional (Lane 2007; 32-36).

Menarik untuk melihat paralelitas pergeseran dari kebijakan ekonomi-politik sosialisme menuju ekonomi pasar yang berlangsung di Indonesia semenjak tahun 1965, dengan yang berlangsung di Chile pada tahun 1973. Seperti yang berlangsung di Indonesia, keterlibatan Amerika dalam kup militer terhadap pemerintahan demokratik sosialis Salvador Allende pada tahun 1973 diawali oleh pelatihan dan beasiswa kepada sejumlah sarjana ekonomi Chile yang sebagian besar adalah lulusan Universitas Katholik Santiago ke Universitas Chicago dibawah pengajaran Milton Friedman. Pelatihan dan beasiswa terhadap akademisi Chile tersebut bertujuan untuk melakukan *counter-ideas* terhadap program-program ekonomi-politik sosialis dibawah rezime demokratik Salvador Allende. Seperti yang berlangsung di Indonesia, kup dan resistensi terhadap pemerintahan Allende diawali oleh penetrasi gagasan dalam kubu militer yang terdesak kepentingan ekonomi-politiknya. Paralelitas jalan menuju pasar bebas di Indonesia dan Chile ini memerlihatkan bahwa perjuangan untuk merestorasi kelas-kelas elite dominan yang terdesak oleh kebijakan populis dan sosialistik dari kelas-kelas popular merupakan dalih utama bagi tampilnya ortodoksi baru ekonomi pasar sebagai paradigma alternatif dalam pengelolaan negara (Harvey 2005; 8-9).

Di Indonesia seiring dengan penghancuran terhadap kekuatan kelas-kelas popular pro-Soekarno, setelah kudeta merangkak Soeharto tahun sejak tahun 1965, bukan saja

artikulasi politik kelas popular lenyap dalam arena perpolitikan Indonesia, namun gagasan, retorika, wacana dan terminologi-terminologi kunci dalam revolusi nasional Indonesia sejak awal pergerakan nasional tahun 1900-an sampai tahun 1965 hilang dalam perbincangan ruang publik intelektual di Indonesia. Kata-kata "revolusi" yang pada masa pergerakan menjadi kode-kode politik bagi pelibatan partisipatoris rakyat dalam aktivitas politik menjadi hilang dalam pergantian rezime, sementara kata-kata "rakyat" yang mengartikulasikan kekuatan politik kelas popular mengalami perubahan makna pada era Orde Soeharto menjadi semata-mata sebagai elemen-elemen pendukung pembangunan. Sementara sejak tahun 1975, rezime Orde Soeharto secara halus telah mengubah kata-kata penting politik zaman pergerakan seperti "buruh" menjadi "pekerja" dan akhirnya "karyawan", sementara "demonstrasi" berubah menjadi "unjuk rasa" (Lane 2007; 40-41; Heryanto 2005; 67).

Meskipun berbagai mekanisme penindasan terhadap kekuatan kelas popular serta peminggiran terhadap kode-kode politik revolusi nasional ini tidak secara langsung terkait dengan aktivitas kalangan akademisi dan proponen pendekatan pasar di Indonesia, namun yang menarik adalah setelah pembersihan terhadap kaum kiri tersebut, praktis penyebaran pengetahuan ekonomi pro-pasar di ruang lembaga-lembaga produsen pengetahuan, relatif tidak mendapatkan perimbangannya yang kuat dari kekuatan politik dan wacana intelektual kaum kiri yang signifikan di Indonesia masa Orde Baru. Penyebaran pengetahuan liberalisme pro-pasar dalam ruang publik intelektual di Indonesia, berjalan ditengah absennya politik berbasis kelas di Indonesia. Momen ini juga dapat ditempatkan sebagai awal dari proses *rupture* (perputusan) dimana tradisi pengetahuan pergerakan nasional perlahan-lahan tidak lagi menjadi pengetahuan hegemonik dalam ruang publik intelektual di Indonesia, ketika ikon dan simbol formalnya kerapkali ditampilkan.

Apabila Alexander Irwan (2005) mengutarakan bahwa dorongan menuju ekonomi pasar bebas yang diinisasi oleh intelektual proponen neoliberal di Indonesia secara perlahan mampu beroperasi secara dominan di level institusi produksi pengetahuan namun memiliki banyak hambatan di level institusi pengambilan kebijakan, maka patut dipertimbangkan argumentasi Chantal Mouffe (1979; 190-191) dalam *Hegemony and Ideology in Gramsci* untuk melihat praktek operasi pengetahuan neoliberalisme di Indonesia. Menurut Mouffe--dalam perspektif *gramscianism*--sebagai proyek pengetahuan hegemonik, praktek neoliberalisasi tidak secara total mengubah cara pandang dan menggantikannya dengan perspektif baru. Pergerakan pengetahuan neoliberalisme berjalan melalui proses transformasi, dimana mereka mengartikulasikan ideologinya melalui proses akomodasi kebijakan, kebiasaan dan asumsi dominan dari tatanan sosial politik yang ada.

Pada konteks Indonesia, penetrasi gagasan neoliberalisme harus menyesuaikan diri dengan rezime pemerintahan otoritarian Soeharto yang tidak pernah penuh meliberalisasi ekonomi dan melindungi jaringan-jaringan kolutif dan nepotis dari klan keluarga Cendana. Namun demikian operasi gagasan neoliberalisme beroperasi dan menyebar sebagai pengetahuan dominan dikalangan lingkaran komunitas epistemik produksi pengetahuan di universitas-universitas, media massa maupun sebagian besar intelektual yang bernaung dibawah lembaga riset yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah dan berada dibawah lindungan militer dan elite loyalis Soeharto (Benny Moerdani, Ali Murtopo, dan Sudjono Humardhani) seperti CSIS (Irwan 2005; 45). Dalam konteks kontestasi wacana dengan gagasan-gagasan lainnya, posisi dominan gagasan proponen pasar dalam

perbincangan intelektual di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari dukungan dan kepercayaan rezime Soeharto terhadap para ekonom liberal (Mafia Berkeley) untuk merubah kebijakan perekonomian di Indonesia pasca rezime Soekarno (Ransom 2006).

Demokrasi Indonesia Dibawah Bendera Neoliberalisme

Setelah berkembang menjadi pengetahuan dominan di lembaga-lembaga riset, universitas, mass media dan institusi produsen pengetahuan, pengetahuan neoliberalisme sampai pada momen yang sangat krusial seiring dengan bergulirnya proses keterbukaan politik dan era demokratisasi di Indonesia. Seperti diuraikan oleh Anders Uhlin (1998: 33), dinamika proses menuju transisi demokrasi di Indonesia diramaikan oleh kontestasi dan difusi wacana-wacana yang beragam tentang demokrasi. Baik diskursus demokrasi yang dibentuk oleh perspektif radikal (marxis, populis kiri dan feminis) berdampingan dengan wacana liberal (ekonomis-politik), wacana konservatif dan Islam (modernis, neomodernis, transformatif).

Ditengah kontestasi dalam pemaknaan demokrasi oleh berbagai wacana yang beragam tersebut, tampilnya rezime pengetahuan demokrasi pasar bebas sebagai narasi utama di Indonesia era reformasi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi politik global. Seiring dengan transformasi besar dalam proses ekonomi politik dunia dan perubahan rezime yang mengatur tatanan ekonomi politik global dari era negara regulatoris menuju rezime pasar bebas, kelas dominan kapitalis global dengan berbagai institusi dan instrumen kekuasaannya (IMF, Bank Dunia dan WTO) secara intens mendesakkan disiplin pasar global melalui penetrasi nilai-nilai budaya, produksi pengetahuan dan ideologi ke dalam jantung pengelolaan ekonomi-politik di negara-negara berkembang. Dalam proses globalisasi inilah perubahan-perubahan ekonomi-politik menjadi sebuah momentum untuk melakukan restrukturisasi pengelolaan negara dan internalisasi pola-pola rezime regulasi baru yang mendesakkan agenda-agenda pasar bebas dan institusionalisasi politik yang dapat mendukungnya (Hoogvelt 1997; Sklair 1997).

Sebagai proyek politik, penetrasi agenda neoliberal dalam proses globalisasi kemudian berjalan untuk meminggirkan hambatan-hambatan publik dan kontrol-kontrol ruang sosial terhadap penetrasi pasar. Sehingga seperti diuraikan oleh Philip McMichael (2000; 111) bahwa ekspansi rezime pasar bebas, pembebasan pasar serta subordinasi kebijakan ekonomi politik negara dibawah otoritas pasar dengan segenap tekhnologi kekuasaannya (liberalisasi pasar, deregulasi ekonomi, privatisasi) tidaklah menghilangkan arti penting politik namun ia mendisiplinkannya agar sesuai dengan rasionalitas dari rezime pasar bebas. Proses transformasi besar-besaran dalam arena ekonomi politik global mendorong pergeseran dari pola-pola ekonomi-politik negara yang mengatur ekonomi nasional menuju proses pengelolaan negara yang sejalan dengan dinamika globalisasi pasar-bebas. Proses pengelolaan tersebut berlangsung di dua wilayah. *Pertama,* memfasilitasi perputaran uang dan komoditas yang lintas batas. *Kedua,* ikut mengatasi hambatan-hambatan dari penyebaran kapitalisme global.

Sejalan dengan argumen dari McMichael diatas, tampilnya pengetahuan demokrasi liberal-prosedural yang sejajar dengan gagasan ekonomi pasar bebas di Indonesia pada era reformasi adalah hal yang logis. Pertautan kedua hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman bahwa wacana pengetahuan demokrasi liberal prosedural dalam rasionalitas politiknya sejalan dengan dinamika ekspansi rezime ekonomi pasar bebas. Terkait dengan koneksi rasionalitas demokrasi prosedural liberal dengan ekonomi pasar bebas, ada

beberapa dinamika global yang patut dicatat dan mempengaruhi konteks ekonomi politik baik di level penyebaran diskursif maupun kesadaran praktikal di Indonesia. Pertama-tama tulisan ini akan mengeksplorasi terlebih dahulu perkembangan yang berlangsung di level diskursif yang membentuk konstruksi rasionalitas demokrasi yang tuinduk terhadap ekspansi pasar bebas.

Perkembangan pertama, seiring dengan menguatnya pengetahuan pasar bebas sebagai rezime regulasi baru dunia semenjak era tahun 1970-an, studi politik pada saat yang sama tengah intens mengamati fenomena tergulingnya rezime-rezime otoritarianisme di negara-negara berkembang seperti di Amerika Latin, Asia-Afrika dan Eropa Selatan serta Eropa Timur pada paruh akhir abad ke-20. Kajian tentang proses runtuhnya rezime-rezime otoritarianisme dan perubahan politik yang menyertainya baik berupa rekonsolidasi otoritarianisme maupun proses demokratisasi ini kemudian diulas secara intens dalam pertemuan akademik yang diselenggarakan oleh Woodrow Wilson International Centre for Scholars pada tahun 1979-1981. Dari pertemuan inilah kemudian muncul produk buku empat jilid *The Transition from Authoritarian* yang ditulis dan dieditori oleh Guillermo O'Donnell dan Philippe Schmitter. Kajian tentang perubahan-perubahan politik pasca otoritarianisme ini—yang kemudian terkenal dengan istilah kajian transitologis--menjadi sebuah mainstream utama dalam perbincangan tentang demokrasi yang secara jeli menemukan situasi-situasi paska-otoritatrianisme, kontestasi antara aktor-aktor politik strategis dan merumuskan jawaban realistis paska otoritarianisme yaitu tatanan demokrasi politik yang terdiri atas penegakan pemilihan umum dan hak-hak sipil dan politik dari warga negara (Agung Putri 2000).

Studi transitologis kemudian menjadi diskursus dominan dalam pengetahuan tentang proses demokrasi, dan menjadi wacana utama dalam pembicaraan ruang publik intelektual di negara-negara yang tengah mengalami proses transisi demokrasi, termasuk di Indonesia. Fokus kajian transitologis demokrasi pada persoalan institutionalisasi politik seperti pemilihan umum, penguatan hak-hak sipil dan politik serta konsentrasi pada interaksi, negosiasi dan proses politik yang berlangsung diantara para aktor-aktor politik strategis. Pembatasan fokus kajian transisi demokrasi ini membuat berbagai persoalan-persoalan krusial saat transisi politik seperti persoalan pemiskinan struktural, pelanggaran hak-hak ekonomi-sosial-budaya, dialektika politik kelas dan ketegangan struktural akibat ekspansi dan proses integrasi ekonomi pasar bebas di negara-negara transisi menjadi luput sebagai bahan perbincangan tentang demokrasi dalam ruang publik intelektual Indonesia.

Perkembangan kedua, fenomena lain yang turut memperkuat rasionalisasi dunia politik di bawah logika pasar bebas adalah studi Francis Fukuyama (1992) yang menggemakan manifesto ideologis dari kemunculan era baru yaitu kemenangan rezime global utama demokrasi dan pasar bebas sebagai akhir dari perjalanan peradaban manusia. Bagi Fukuyama, akhir perang dingin dan runtuhnya sosialisme di Eropa Timur dan Uni Sovyet ini telah menuntaskan akhir dari pertarungan ideologi dan kemenangan liberalisme ekonomi dan politik. Perkembangan logis dari kekuatan pasar ke seluruh dunia, penyebaran budaya konsumerisme dan perkembangan tekhnologi memfasilitasi demokrasi liberal yang berbasis pada kebebasan individu sebagai bentuk final dari tata pemerintahan umat manusia. Karya Fukuyama tersebut mendeklarasikan secara tuntas perkawinan demokrasi liberal dan rezime neoliberalisme. Pemilihan umum yang bebas bersanding

dengan pasar bebas, warganegara yang bebas dimaknai identik dengan kebebasan konsumen dalam arena pasar bebas.

Dalam perspektif demokrasi liberal dan pasar bebas ini, tidak dimungkinkan tampilnya bentuk wacana pengetahuan politik alternatif selain demokrasi liberal prosedural. Apabila Margareth Thatcher menguraikan tidak ada alternatif lain maka Francis Fukuyama menegaskan demokrasi pasar bebas sebagai akhir dari sejarah manusia. Kedua pernyataan tersebut ibarat deklarasi demokrasi pasar bebas sebagai ideologi hegemonik dalam rezime ekonomi-politik global abad ini. Ketika rezime demokrasi diklaim menjadi satu-satunya pengetahuan absah, maka perspektif tentang demokrasi yang beragam direduksi pada desain demokrasi liberal proseduralis. Sementara kedaulatan sebagai warga negara disamakan dengan kebebasan konsumen dalam transaksi pasar bebas. Hal ini bisa difahami dalam konteks hegemoni ideologi neoliberal, mengingat hanya desain politik demokrasi seperti inilah yang sejalan dengan pergerakan akumulasi kapital dan ekspansi pasar bebas. Sejalan dengan persetujuan ekonomi-politik global yang menempatkan wacana demokrasi pasar bebas sebagai diskursus dominan perjalanan politik demokratisasi di Indonesia pada era reformasi mengafirmasi desain demokrasi liberal pasar bebas sebagai jalan reformasi Indonesia pasca Orde Baru (Steger 2005; Fukuyama 1992).

Perkembangan ketiga yang ikut membentuk desain pengetahuan demokrasi liberal-pasar bebas di Indonesia saat ini adalah tampilnya diskursus "tolak negara" yang berjalan seiring dengan berkembangnya wacana *civil society* di Indonesia pada era tahun 1990-an. Seiring dengan penolakan terhadap tindakan otoritarianisme rezime Soeharto, sejak tahun 1990-an, wacana pemberdayaan *civil society* menjadi strategi politik utama untuk mendorong proses demokratisasi. Keberhasilan proses demokratisasi di negara-negara Eropa Timur yang mengandalkan kekuatan masyarakat sipil diluar sistem rezime totalitarian menjadi model politik yang inspiratif. Diskursus *civil society* di Indonesia tampil dengan suara penolakannya terhadap tindakan aktif dari negara. Tidak saja aktivitas dan intervensi negara dalam arena sipil dan politik yang harus dibatasi, namun segenap aktivitas negara dalam arena ekonomi yang tidak sejalan dengan agenda privatisasi, liberalisasi perdagangan dan perluasan pasar bebas harus ditolak. Diskursus "tolak negara" yang bergulir seiring dengan gagasan *civil society* ini turut memfasilitasi penguatan demokrasi liberal dan ekonomi pasar bebas.

Sementara sejalan dengan tarikan wacana *civil society* yang menolak pasar, terjadi pergeseran dan reduksi signifikan dalam pemaknaan *civil society* di Indonesia. Keragaman pengetahuan tentang wacana *civil society* yang sangat kaya dibatasi sebagai sekrup komponen pendukung bagi penguatan diskursus neoliberalisme yang mengatur relasi antara negara, masyarakat sipil dan pasar bebas. Model-model pembacaan lain terhadap narasi civil society yang berbasis pada pemahaman republikanisme maupun *gramscianism*--yang menekankan pada aktivasi peran politik rakyat dalam proses politik pembebasan dari kolonisasi kehidupan dan artikulasi organik dari kontestasi kelas dalam arena publik--tidak lagi terdengar kencang atau hanya sayup-sayup dalam perbincangan intelektual Indonesia. Seperti diutarakan oleh Mansour Fakih (2002) bahwa diskursus *civil society* di Indonesia dibentuk sesuai arahan dari rezime regulasi global pasar bebas yang melalui institusi-institusinya seperti Bank Dunia mendorong proyek penguatan masyarakat sipil yang melayani kepentingan rezime pasar bebas dan ideologi neoliberalisme.

Perkembangan keempat, kompatibilitas demokrasi prosedural formal dan ekonomi pasar bebas sebagai diskursif dominan dalam wacana demokrasi terkoneksikan dengan munculnya wacana tentang otonomi dan kebebasan individual sebagai basis utama tatanan demokrasi modern. Dalam perkembangan politik global, tampilnya wacana tentang supremasi individualisme dibandingkan ikatan sosial komunitas sebagai tulang punggung demokrasi, sangat terkait dengan dominasi kaum konservatif di AS dan Inggris sejak tahun 1970-an. Deklarasi kemenangan gagasan individualisme dalam arena politik dikukuhkan dengan pernyataan Margareth Thatcher pada tahun 1987, ketika ia menguraikan "tidak ada yang disebut masyarakat, yang ada hanyalah individu laki-laki serta perempuan dan keluarganya". Dalam kajian politik, menguatnya gagasan tentang individualisme ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan filsafat politik liberal kontemporer dan hadirnya teori "aggregative model" yang mempengaruhi kajian tentang pemilihan umum maupun studi *voting behaviour* .

Bersamaan dengan kritik kaum liberal terhadap kecenderungan menguatnya kolektivisme dalam pergolakan wacana di Eropa pasca Perang Dunia Ke-2, filsuf liberal utama yaitu Isaiah Berlin pada tahun 1969 dalam karyanya *Four Essays on Liberty* menguraikan konsep tentang kebebasan positif dan negatif. Menurut Berlin, kebebasan negatif (*negative liberty*) yang menekankan pada kebebasan tiap-tiap individu dari intervensi yang dapat menghambatnya untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya-- seperti hak personal--merupakan prinsip yang harus dibela oleh kaum liberal. Sementara prinsip kebebasan positif yang menekankan pada kebebasan individu untuk dapat mengaktualisasikan dan memenuhi potensi-potensi terbesar dari dirinya, seperti hak untuk mendapatkan jaminan atas kesehatan, perumahan, sandang dan pangan yang merupakan fondasi dasar kehidupan politik komunitas, dapat menjebak manusia menuju praktik politik totalitarian.

Prinsip *negative liberty* ini merupakan sumbangan filosofis utama dalam perspektif otonomi individualisme. Untuk memperoleh kehidupan politik demokratis yang sehat, kaum liberal modern seperti Berlin percaya bahwa konsep tentang kebebasan harus dibatasi dalam pemenuhan kesetaraan dan hak-hak politik secara formal (kesetaraan hak-hak politik, kewargaan dan akses yang sama). Pemenuhan kesetaraan ekonomi dengan desain peran-peran negara dalam wilayah sosial-menurut kaum liberal-- akan menghancurkan kebebasan itu sendiri. Terkait dengan kontradiksi yang akan muncul ketika kebebasan dan kesetaraan politik formal tidak akan menjamin kesetaraan secara penuh, filsuf liberal lainnya yaitu Robert Nozick (1977) melangkah lebih jauh dengan mengutarakan bahwa liberalisme dalam batas-batas tertentu memiliki karakter anti-egalitarianisme. Ketimpangan sosial tidak memerlukan proses regulasi-regulasi politik yang melibatkan negara untuk diselesaikan, karena regulasi politik tersebut akan menghancurkan fondasi kebebasan itu sendiri. Perluasan dari prinsip otonomi individu dan kebebasan negatif ini adalah pembagian secara tegas arena publik dan privat serta perluasan wilayah yang dimaknai sebagai arena privat. Ketika wilayah ekonomi menjadi bagian dari arena privat, maka dominasi korporasi dan kelompok borjuasi terhadap kehidupan publik menjadi bagian dari ruang privat yang tidak tersentuh oleh proses demokratisasi.

Seiring dengan bergulirnya filsafat kebebasan individual yang menjadi pengikat demokrasi pasar bebas, tampil wacana tentang *rational and public choice theory* yang

mengasumsikan bahwa tiap-tiap individu haruslah memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri. Dalam demokrasi kehendak untuk mementingkan diri sendiri tersebut kemudian dikelola oleh proses-proses politik demokrasi, seperti melalui saluran pemilihan umum. Tampilnya konsep kebebasan negatif dan pemenuhan kepentingan diri dalam gagasan liberalisme modern telah meminggirkan wacana solidaritas, ikatan sosial dan komunitas yang menjadi basis dari format demokrasi yang lain.

Di Indonesia sebagai bagian dari arus mata rantai dari sirkulasi ekonomi politik dunia, maka empat trend utama dalam perkembangan diskursif demokrasi ini turut membentuk konstruksi dominan dalam pemahaman akan demokrasi di era reformasi. Tampilnya wacana demokrasi pasar bebas sebagai arus utama pemaknaan demokrasi di Indonesia terkondisikan oleh tampilnya semangat "tolak negara" yang mengikuti ekspansi pasar bebas, prioritas pada pemilihan umum, interaksi aktor strategis dalam arena politik, pengutamaan hak-hak sipil dan politik (dengan meminggirkan hak-hak fundamental ekonomi, sosial dan budaya dari warganegara) dan fondasi kebebasan individual sebagai basis kehidupan politik demokrasi dan aktivitas ekonomi. Pembatasan arena politik demokrasi dalam rasionalitas yang mengabdi pada ekspansi rezime regulasi pasar bebas ini telah meluruhkan fondasi-fondasi lain dari kehidupan demokrasi seperti kehendak hidup bersama, kedaulatan dan partisipasi aktif rakyat dalam ruang politik untuk memastikan hak-hak dasar dirinya terjamin, dan kedaulatan rakyat itu sendiri ketika berhadapan dengan tirani modal.

Membangun Persetujuan Demokrasi Pasar Bebas di Indonesia

Setelah membahas dengan singkat transformasi ekonomi politik global dan transformasi pengetahuan yang mempertautkan diskursus demokrasi dan pasar bebas dan pengaruhnya di Indonesia pasca rezime otoritarianisme, akan kita telusuri bagaimana proses pembentukan persetujuan (*construction of concent*) rezime pengetahuan tersebut berlangsung dalam arena politik keseharian di Indonesia. Seperti diutarakan oleh Antonio Gramsci (1971; 321-343) bahwa beroperasi dan dominannya sebuah praktik ideologis di masyarakat tidak dapat dilepaskan dari proses politik kultural yang intens untuk membentuk kesepakatan bersama di masyarakat (*common sense).* Untuk menjadi wacana hegemonik, sebuah ide berjalan melalui pembentukan persetujuan kolektif dengan turut membentuk semangat dan kehendak kolektif yang tampil seiring dengan proses perubahan sosial yang terjadi. Mengikuti analisis Gramsci mengenai praktik hegemoni, upaya untuk memahami operasi wacana neoliberalisme di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari praktik politik keseharian sebagai landasan material dari pembentukan persetujuan bersama dari pengetahuan tersebut di era reformasi.

Dalam pembacaan politik keseharian yang berlangsung di era reformasi inilah, tampilnya praktik ideologis neoliberalisme di Indonesia berlangsung tidak terlepas dari hiruk-pikuk politik gerakan reformasi, ketika kebebasan politik menjadi tujuan utama dan negara dipandang sebagai institusi koersif yang selalu memantau, menindas dan mengawasi kehidupan masyarakat sipil. Mengamati perkembangan wacana neoliberalisme di Indonesia seiring dengan proses reformasi, dua isu utama tampil mewarnai ruang publik yaitu isu tentang kebebasan politik ditengah suasana ketertutupan di era Orde Baru dan tuntutan keadilan sosial yang didesakkan oleh kekuatan-kekuatan politik akar rumput. Tuntutan untuk lepas dari belenggu otoritarianisme negara dan penghormatan terhadap

kebebasan individu diartulasikan bersamaan dengan dorongan untuk partisipasi politik yang lebih luas dari kekuatan gerakan sosial petani, buruh dan masyarakat miskin. Seruan untuk memangkas peran-peran intervensionis negara dalam setiap lini kehidupan tampil bersamaan dengan agenda keadilan sosial dalam gagasan *civil society*, sementara dorongan untuk memperjuangkan hak-hak sipil dan politik diperjuangkan secara simultan dengan pentingnya hak-hak ekonomi dan sosial. Tuntutan untuk mendorong iklim kehidupan ekonomi yang bebas ditengah *clientelisme* dan nepotisme rezime Orde Baru diutarakan seiring dengan protes reformasi agraria dan politik tanah serta hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari kekuatan buruh. Sementara seperti diuraikan oleh David Harvey (2005; 41) bahwa nilai-nilai kebebasan individu tidak selalu selaras dengan dorongan nilai-nilai keadilan sosial. Dalam banyak hal perjuangan untuk mencapai keadilan sosial yang membutuhkan semangat solidaritas dan kolektivitas berbasis kewargaan membutuhkan kesediaan untuk menerima pembatasan terhadap pemenuhan kepentingan diri sendiri.

Dalam konteks pergerakan politik reformasi di Indonesia, latar belakang dari tuntutan untuk melakukan proses demokratisasi di Indonesia didorong oleh beberapa faktor. Selain perubahan konstelasi ekonomi-politik global dan tampilnya ruang-ruang publik pada era akhir pemerintahan Soeharto, ekspansi kapital dan pembangunan ekonomi di Indonesia memunculkan aktor-aktor pro-demokrasi radikal dan populis yang bergerak dibawah tanah untuk memperjuangkan agenda-agenda politik akar rumput dari kelompok petani dan buruh industrial. Semenjak era awal tahun 1990-an, kelompok LSM yang mengartikulasikan model-model politik alternatif dan isu tentang HAM bergerak dalam arus strategi yang berbeda, mereka berjuang melalui penguatan gerakan akar rumput maupun bergerak dari atas melalui partai politik.

Namun demikian dalam konteks perkembangan gerakan politik akar rumput di Indonesia terhambat oleh beberapa faktor untuk menorehkan warna politik partisipatoris dalam kanvas politik Indonesia Pasca-reformasi. Kesuksesan dari rezime neo-korporatisme Orde Baru untuk menindas kekuatan politik kelas dan mensubordinasikan dalam politik korporatis dibawah negara, keretakan internal dalam kekuatan politik akar rumput dan krisis ekonomi-politik di akhir pemerintahan Soeharto menghambat terbangunnya konsolidasi politik artikulasi kelas popular di Indonesia. Sementara dinamika politik gerakan reformasi 98 menyumbang celah politik yang turut memproduksi eksisnya rezime demokrasi terbatas yang bersifat elitis. Seperti diutarakan oleh Vedi R. Hadiz (2005) sebenarnya momen reformasi 1998 memberikan ruang kesempatan koalisi antar sektoral dan kelas yang dapat memproduksi gagasan alternatif demokrasi berkarakter partisipatoris. Namun demikian kesempatan tersebut pupus akibat artikulasi politik gerakan reformasi yang mengambil jalur gerakan moral yang eksklusif sehingga tidak tegas dalam mengambil sikap dan tindakan-tindakan politik, serta watak eksklusif yang menutup diri dari komunikasi dan koalisi dengan kekuatan buruh, petani maupun kaum miskin kota.

Watak eksklusif tersebut pada akhirnya memberi peran bagi pola transisi demokrasi Indonesia yang menggunakan jalur politik kompromis *transplacement*. Transisi demokrasi di Indonesia sejak awal mengambil jalur elitis dan berlangsung melalui negosiasi antara kaum elite oposisi moderat dan kelompok pragmatis didalam rezime yang menyadari bahwa perubahan politik tidak terelakkan untuk menyelematkan kepentingan ekonomi politik mereka (Samuel P. Huntington; 1990). Jalur ini akhirnya mengesampingkan

langkah perubahan politik sebagai desakan arus besar politik oposisional yang dapat menyapu bersih anasir-anasir rezime otoritarian.

Akibat dari jalan politik konsesional antara kekuatan didalam rezime dan kaum oposisional ini, arena politik transisional berwatak demokrasi terbatas dan banyak mengabaikan agenda-agenda mendasar demokrasi seperti penyelesaian pelanggaran HAM, tampilnya kekuatan-kekuatan kelas sosial marjinal dalam arena demokrasi, serta surutnya wacana politik kesejahteraan sebagai bagian dari praktik politik demokrasi. Penelusuran sekilas tentang fase-fase awal dari gerakan reformasi tersebut memberikan pelajaran yang tak ternilai dimana ketika arus perubahan politik memberikan kesempatan yang begitu besar untuk merealisasikan perubahan-perubahan sosial politik yang dapat mendorong agenda politik partisipatoris dan keadilan sosial, aktor-aktor politik demokrasi melepaskannya dan membiarkan arus besar politik Indonesia setelah reformasi bergerak menuju jalur demokrasi yang terbonsai melalui kombinasi demokrasi prosedural terbatas-ekonomi pasar bebas.

Seiring dengan melemahnya daya tekan dari kekuatan gerakan politik akar rumput untuk mendesakkan agenda politik emansipatoris, wacana neoliberal yang menekankan pada kebebasan individu dan kemerdekaan diarena politik dan ekonomi tampil perlahan-lahan sebagai pengetahuan hegemonik yang ikut mengkonstruksi wacana demokrasi di Indonesia. Dalam konteks Indonesia ketika wacana demokrasi partisipatoris tidak tampil sebagai diskursus dominan, narasi demokrasi-pasar bebas bergulir sebagai pengetahuan dominan seiring dengan dukungan lembaga-lembaga donor dan negara-negara maju terhadap agenda-agenda politik seperti pemilihan umum, program *good governance* dan perluasan pasar bebas oleh IMF, Bank Dunia dan agensi-agensi donor lainnya (Herlambang Perdana Wiratraman 2006).

Drama politik pada era-era awal reformasi yang berujung pada dekonsolidasi politik gerakan sosial akar rumput dan rekonsolidasi elite-elite politik serta tampilnya neoliberalisme yang membentuk wacana demokrasi ini dalam beberapa hal dapat dibandingkan dengan perjalanan narasi neoliberalisme di Eropa pada momen-momen kritikal pada era akhir 1960-an. Seperti diuraikan oleh David Harvey (2005; 40-43) proses transformasi sosial menuju rezime neoliberalisme di Eropa dan Amerika Serikat secara tidak terduga terfasilitasi oleh momentum tampilnya gerakan kiri kaum muda yang berlangsung pada tahun 1968. Kritik dan upaya untuk merevitalisasi wacana Marxist yang digulirkan oleh gerakan mahasiswa di Eropa dan Amerika Serikat memunculkan secara bersamaan wacana kebebasan individual dan tuntutan untuk mendorong keadilan sosial sebagai muatan utama dalam kritik terhadap formasi kapitalisme. Penolakan terhadap intervensi negara yang begitu besar dalam wilayah kehidupan berjalan seiring dengan penentangan terhadap sistem ekonomi pasar, korporasi kapitalis dan kekuatan kelas kapitalis. Seiring dengan artikulasi politik perlawanan terhadap dominasi subsistem negara dan pasar dalam ruang publik ini terjadi ketegangan antara wacana kebebasan individu dan dorongan-dorongan politik keadilan sosial.

Di berbagai tempat seperti di Prancis misalnya ketegangan ini memunculkan fraksi-fraksi antara kekuatan tradisional kiri (Partai Komunis Prancis) dan suara-suara gerakan mahasiswa kiri baru. Pada perkembangannya kemudian fragmentasi ini secara perlahan-lahan memisahkan artikulasi-artikulasi kiri baru seperti gerakan sosial libertarian, transeksual, politik identitas dan multikulturalisme dengan artikulasi politik kelas seperti

gerakan buruh yang terpusat pada isu keadilan sosial melalui strategi penguasaan negara. Ditengah keretakan politik didalam gerakan sosial politik progresif inilah, diskursus neoliberalisme kemudian melakukan restorasi terhadap posisi politik dari kelas-kelas ekonomi dominan di Amerika Serikat dan Eropa. Dengan masuk dan menguasai diskursus penolakan terhadap peran intervensionis dan praktik regulatoris negara, maka dalam ruang publik, wacana neoliberal tampil sebagai pejuang kebebasan individual diperluas pada kebebasan konsumen dan penghormatan terhadap keragaman gaya hidup. Selanjutnya dibawah akan diuraikan bagaimana pembentukan klaim-klaim ideologis demokrasi neoliberal terbangun untuk membentuk persetujuan bersama dikhalayak publik Indonesia.

Pembentukan Klaim-Klaim Ideologis Demokrasi Pasar Bebas

Setelah melalui praktik politik keseharian yang tampil sebagai basis sosial dari pergerakan wacana neoliberalisme dalam mengkonstruksi demokrasi di Indonesia, dalam membentuk persetujuan kolektif, diskursus *free market democracy* tidak melupakan proses kesepakatan melalui penciptaan klaim-klaim ideologis. Seperti diuraikan oleh Manfred B. Steger (2005;21) ketika menjelaskan upaya mengkonstruksi globalisasi dengan ideologi globalisme/neoliberalisme sebagai jalan untuk membentuk persetujuan bersama dan menyemaikan pandangan tidak kritis yang menggiring publik untuk memahami globalisasi semata-mata sebagai proses ekonomi-politik yang mengarahkan pada penguatan ekonomi pasar bebas sebagai tumpuan dari proses demokratisasi, hal yang sama juga terjadi dalam konstruk demokrasi pasar bebas terkini.

Neoliberalisme sebagai sebuah ideologi memiliki peran yang sangat besar untuk membentuk gagasan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, sehingga publik secara tidak kritis memaknai demokrasi dengan klaim-klaim kebenarannya yaitu persesuaian demokrasi dan ekspansi pasar bebas, pergeseran peran negara ke pinggir terkait dengan peran-peran sosial ekonominya, maupun basis otonomi dan kebebasan individual sebagai landasan pijak dari demokrasi. Seperti halnya praktik ideologi upaya membentuk demokrasi dengan narasi pasar bebas dan demokrasi liberal memiliki karakter yang khas ketika disemaikan keruang publik, ia mengkonstruksi moralitas dengan menentukan mana yang "benar" dan mana yang "salah atau "sejalan dengan arus zaman" dan "ketinggalan zaman", memuja, merayu dan mengutuk. Untuk mengokohkan klaim-klaim kebenarannya ideologi demokrasi pasar bebas melakukan tindakan simplifikasi, distorsi, legitimasi dan integrasi. Selanjutnya tulisan ini akan memetakan beberapa klaim-klaim ideologis yang banyak digunakan oleh para penganjur demokrasi-pasar bebas di Indonesia. Sehingga melalui pemataan dan analisis kritis terhadapnya kita dapat memahami bagaimana pengaruh ideologi neoliberalisme "memiskinkan" proses demokrasi di Indonesia.

Klaim ke-1: Demokrasi Liberal Sebagai Satu-Satunya Model Demokrasi Yang Absah

Salah satu klaim utama yang dikampanyekan oleh para pendukung demokrasi liberal pasar bebas di Indonesia dan dunia internasional adalah keyakinan yang coba dipenetrasikan ke khalayak publik bahwa demokrasi liberal adalah satu-satunya model demokrasi yang absah di dunia. Upaya untuk membentuk persetujuan terhadap klaim tersebut diuraikan melalui tekhnologi propaganda secara berulang-ulang di media massa sehingga menjadi sebuah rezime kebenaran baru yang disepakati bersama (*common*

sense). Strategi diskursif yang kerapkali digunakan oleh para proponen demokrasi liberal-pasar bebas seperti halnya praktik ideologis yang lain adalah memilah-milah dan membangun oposisi biner dengan menempatkan liberalisme sebagai satu-satunya landasan filosofis yang "absah" dari demokrasi dan memojokkan gagasan-gagasan lain seperti republikanisme, sosialisme dan gagasan-gagasan lain yang lebih bersifat partisipatoris sebagai landasan yang "salah" bagi fondasi demokrasi.

Dalam konteks perbincangan ruang publik di Indonesia salah satu Indonesianis ternama yaitu Prof. William Liddle dari Ohio State University adalah salah satu pendukung dari gagasan ideologis ini. Dalam salah satu interview di acara radio talkshow Forum Freedom edisi 60 pada tanggal 10 Juli 2006, membenarkan pandangan bahwa demokrasi liberal adalah satu-satunya klaim demokrasi yang absah. Seperti halnya pembentukan klaim-klaim ideologis lainnya, argumen untuk membenarkan pendapatnya, ia bangun dengan menunjukkan praktik-praktik politik di negara-negara lain yang mengadopsi sosialisme dan demokrasi rakyat sebagai gagasan yang tidak valid untuk menopang praktik politik demokrasi. Bahkan lebih tajam lagi, para pendukung demokrasi liberal di Indonesia menjelaskan bahwa gagasan partisipatoris dan sosialistik yang ditekankan berulang-ulang oleh para pendiri Republik Indonesia sebagai gagasan yang tidak kontekstual dan relevan diimplementasikan saat ini (Saiful Muzani 2006; William Liddle 2008). Tidak lupa para ideology demokrasi pasar bebas "mengutuk" kalangan yang masih setia terhadap cita-cita zaman pergerakan nasional tersebut sebagai para demagog murahan.

Selanjutnya untuk mengukuhkan klaim liberalisme sebagai satu-satunya fondasi filosofis dari demokrasi, Liddle (2006) meneruskan uraiannya tersebut dengan mendefinisikan demokrasi secara terbatas sebagai prosedur dimana masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang duduk di dewan perwakilan rakyat. Argumen dari Liddle yang menentukan liberalisme sebagai satu-satunya fondasi yang absah bagi demokrasi dan karakter proseduralisme sebagai arti sesungguhnya dari demokrasi membawa kita pada analisis William I. Robinson (1996:56-62) dalam bukunya Promoting Polyarchy: Globalization, US Intervention and Hegemony yang menguraikan tentang proyek neoliberal Amerika yang ingin disemaikan dilahan negara-negara berkembang yang tengah melakukan proses perubahan sosial-politik. Menurut Robinson apa yang dipromosikan oleh Amerika Serikat sebenarnya bukanlah demokrasi yang menghormati kedaulatan rakyat melalui praktik politik partisipatoris, namun lebih merupakan desain politik demokrasi liberal yang mendukung *polyarchy* untuk mengamankan posisi elite-elite kekuasaan dan penetrasi modal.

Seperti diutarakan oleh David Beetham (1999) bahwa pemahaman *mainstream* diskursus demokrasi yang menekankan pada dimensi prosedural demokrasi semata-mata pada aspek elektoral politik, telah mengabaikan berbagai elemen substansial dari demokrasi itu sendiri. Menjadikan aspek pemilihan umum yang bebas dan kompetitif, eksisnya multi partai dan terpilihnya pemimpin publik melalui mekanisme pemilu yang fair sebagai tujuan dari demokrasi itu sendiri, atau menempatkan demokrasi sebagai *empty space* (ruang kosong), sama dengan meniadakan substansi demokrasi, yaitu ketika setiap kebijakan politik yang mengikat warga negara harus melibatkan partisipasi dan kontrol dari kekuatan masyarakat sipil. Pada intinya gagasan proseduralis demokrasi ini akan melindungi elite-elite ekonomi politik dan membatasi peran partisipatoris rakyat untuk mengaktivasikan peran partisipatoris politiknya.

Namun demikian melalui strategi diskursif, kaum liberal menempatkan gagasan demokrasi partisipatoris diatas sebagai gagasan marjinal. Model demokrasi partisipatoris kerapkali dikritik oleh para penganut pendekatan demokrasi prosedural elitis. Mereka mengatakan bahwa para penganut pandangan demokrasi maksimalis (partisipatoris), karena menggunakan standar terlalu tinggi terhadap proses demokrasi, kemudian terbentur pada skeptisisme dan hanya menuntut hasil-hasil demokrasi yang berkorelasi dengan kesejahteraan. Ketidakpuasan terhadap proses demokrasi yang telah berlangsung ini kemudian berujung pada penolakan terhadap capaian-capaian aktual dari proses demokratisasi itu sendiri.

Terhadap keberatan tersebut, ada baiknya kita menimbang kembali gagasan klasik dari filsuf politik Republikan Seldon Wolin (1960; 290) saat dia menguraikan, ketika proses demokrasi hanya berfihak pada kepentingan elitisme politik, meninggalkan keadaban politik dan menjadikan publik hanya menjadi penonton; maka kebebasan dan hak-hak politik akan dipandang secara membosankan dan kehilangan signifikansinya dihadapan publik. Rakyat akan bersikap apatis dan tidak akan memiliki kepercayaan bahwa segenap kepentingan dan harapan untuk merubah kondisi hidupnya dapat dilakukan melalui aktivitas-aktivitas politik dalam ruang publik. Dengan menghilangkan sisi normativitas dari demokrasi, maka wacana kewargaan akan tereduksi semata-mata sebagai barang komodifikasi murahan dan demokrasi hanya menjadi jalan bagi berakhirnya tindakan politik.

Klaim ke-2: Kepentingan Diri dan Kebebasan Individual Penopang Demokrasi Pasar Bebas

Klaim kedua yang sering dipropagandakan oleh para ideolog demokrasi pasar bebas adalah pengutamaan kepentingan diri dan kebebasan individu sebagai pilar dasar demokrasi. Oleh para pendukungnya di Indonesia mereka memandang ini sebagai satu-satunya sumber moralitas yang absah. Untuk mencermati klaim ideologis ini, maka dibawah ini akan diuraikan pandangan dari Rizal Mallarangeng (2005) yang mendukung argument tersebut:

Sekali lagi kita lihat bahwa dalam *politic-economical Liberalism* percaya kepada kebebasan, bahwa manusia mampu menemukan apa yang baik, mampu bepikir bagi dirinya sendiri, dan dalam proses mengejar kepentingan dirinya sendiri yang membawa manfaat bagi orang lain. Demikian pula dalam bidang ekonomi. Dalam ekonomi juga dipercaya bahwa para penjual dan pembeli mementingkan kepentingan mereka sendiri, itu tidak perlu dinafikan.

Mengingat begitu kuatnya nilai-nilai kebaikan bersama dan kesejahteraan umum tertanam dalam budaya politik masyarakat Indonesia maka klaim pengutamaan kepentingan diri ini kerapkali disamarkan oleh para pendukung demokrasi pasar bebas dengan menguraikan prinsip-prinsip dasar demokrasi selain memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat melalui pemilihan umum yang bebas disertai dengan pengutamaan hak-hak politik dan sipil dari warga negara, namun dengan menisbikan hak-hak ekonomi dan sosial dari warganegara. Upaya strategi manipulatif yang digunakan adalah dengan menggeser hak-hak ekonomi dan sosial sebagai "kemerdekaan" dan "keterbukaan" ekonomi dari setiap warganegara untuk masuk dalam pasar bebas (Rizal Mallarangeng 2007; William Liddle 2006). Tujuan utama dari pengedepanan pemenuhan kepentingan diri ini adalah

untuk memberikan argumentasi rasional yang absah bagi praktik ekspansi pasar bebas yang dilindungi oleh proses demokratisasi politik.

Pandangan ini apabila ditelusuri salah satunya berakar dari gagasan filosofis yang dikemukakan oleh Voltaire dan David Humme. Mereka menampilkan prinsip pemenuhan kepentingan diri (*self interest*) sebagai pengganti prinsip altruism Kristiani masyarakat Eropa yang menggerakkan kehidupan sosial. Yang melekat dalam diri manusia bukan saja dosa bawaan (seperti tertuang dalam doktrin kristiani) namun juga hasrat duniawi untuk mengejar kepentingan diri. Bagi mereka ketika tiap-tiap individu hanya berpegang pada pemenuhan kepentingan diri, maka dengan sendirinya mereka akan sadar akan kepentingan yang lain dan lingkungan sekelilingnya untuk dapat menjamin pemenuhan kepentingan dirinya. Pada awalnya pengutamaan kepentingan diri sebagai tulang punggung filsafat pencerahan memiliki makna revolusioner untuk menempatkan setiap orang dalam posisi setara. Bukan saja kalangan pendeta dan aristokrat saja yang absah untuk memiliki kepentingan diri, namun seluruh individu memiliki posisi yang setara dalam mengejar pemenuhan kepentingan diri. Namun demikian pengutamaan kepentingan diri ini menjadi bermasalah ketika mengabaikan yang "sosial" dalam pemenuhan kehendak bersama dari warganegara. Selanjutnya kita akan memasuki argumen tersebut setelah melihat secara ringkas perkembangan gagasan kepentingan diri.

Berangkat dari konsepsi filosofis inilah para penggagas doktrin filosofis neo-liberalisme--Milton Friedman dan Frederich von Hayek--meradikalkan pandangan tersebut dengan menempatkan pasar bebas sebagai desain institusional utama yang dapat mewadahi dan memenuhi segenap kepentingan-kepentingan diri dari tiap-tiap orang. Dalam paradigma neo-liberal masyarakat difahami sebagai kumpulan jumlah komulatif individu-individu, sehingga upaya untuk memenuhi kepentingan masyarakat dijalankan dengan memenuhi kebutuhan agregatif dari tiap-tiap orang. Dalam pandangan kaum neo-liberal, institusi pasar bebas tempat proses transaksi jual beli berlangsung merupakan institusi utama yang harus ditegakkan agar tiap-tiap orang akan dapat terpenuhi kebutuhan dirinya. (John S. Dryzek 1996; 94).

Prinsip mengejar kepentingan diri seluas-luasnya dalam arena pasar bebas, hanya akan mengakomodasi mereka yang dapat membayar dan memberi keuntungan dalam transaksi ekonomi yang diakui untuk mendapatkan fasilitas bagi kenyamanan hidupnya. Alih-alih bersikap egalitarian karena dapat memuaskan kepentingan tiap-tiap individu, mekanisme pasar bebas justru menjadi kerangka institusional yang berperan untuk mengeklusi setiap kepentingan dari mereka yang paling terpinggirkan secara ekonomi. Secara lebih jauh pengedepanan rezime pasar bebas tanpa mempersiapkan perangkat regulasi yang tepat diatur oleh otoritas publik, hanya akan menghancurkan fondasi dasar kehidupan publik yang berangkat dari ikatan "relasi sosial" (Jacqueline A. Ortiz 1995; 28).

Kondisi ini sejak awal telah diperingatkan oleh *founding father* sistem kapitalisme yaitu Adam Smith. Bagi Smith mekanisme pasar bebas dengan sendirinya akan sangat berbahaya bagi tatanan publik, ketika masing-masing orang hanya mengejar kepentingan egoistik dirinya sendiri. Institusi pasar bebas memerlukan topangan karakter solidaritas dan kepercayaan yang bersumber dari semangat komunitas, agar baik penjual dan pembeli dapat duduk bersama secara setara dalam proses transaksi pasar. Masyarakat Eropa abad ke-18 zaman disaat Adam Smith hidup memperlihatkan spirit loyalitas, altruisme dan solidaritas begitu besar yang tumbuh dari rahim kehidupan komunitas. Namun demikian

kondisi ini sangat berbeda di era paruh akhir abad ke 20, ketika kepentingan diri menjadi agama baru, dan semangat solidaritas yang tumbuh dari kehidupan komunitas masyarakat sipil yang sehat tergerus oleh kolonisasi wilayah ekonomi berbasis pasar bebas ke dalam setiap wilayah kehidupan publik (Charles Derber et.al. 1995; 171). Sistem pasar bebas buta terhadap agenda prioritas dari kepentingan-kepentingan bersama. Keuntungan yang dihasilkan memberikan pertumbuhan dan keuntungan material, namun dalam jangka panjang, sistem pasar bebas yang berjalan eksesif tanpa batasan hanya akan menghancurkan ikatan-ikatan sosial yang mengintegrasikan kehidupan bersama dalam ruang publik. Prinsip "kebaikan bersama" akan hancur digerus oleh prinsip pasar bebas yang berlandaskan efisiensi ekonomi dan kepentingan diri.

Klaim ke-3: Ekspansi globalisasi neoliberal mendorong dan memfasilitasi proses demokratisasi

Setelah menegaskan demokrasi liberal dan pemenuhan kepentingan diri sebagai landasan absah satu-satunya dari model demokrasi, para proponen demokrasi pasar bebas menegaskan ekspansi globalisasi neoliberal sebagai kekuatan alamiah yang mendorong proses demokratisasi. Dalam pembentukan klaim ketiga ini propaganda ideologis berjalan melalui strategi reduksi dan manipulasi. Para pendukung demokrasi pasar bebas di Indonesia kerapkali menyemaikan klaim ini dengan mengutarakan kesejajaran antara ekspansi seluas-luasnya pasar bebas dengan dukungan untuk melakukan demokrasi politik (Rizal Mallarangeng; 2006).

Kesepakatan terhadap dorongan globalisasi pasar bebas untuk mendukung proses demokratisasi ini menggemakan tesis utama yang diuraikan oleh Thomas Friedman (1999; 191-192) dalam *The Lexus and The Olive Tree.* Menurut Friedman bahwa integrasi negara-negara berkembang menuju pasar bebas akan mendorong negara tersebut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan fleksibel. Secara bersamaan prinsip-prinsip ini akan mengkondisikan negara tersebut menuju proses demokrasi. Uraian dari Thomas Friedman ini mengingatkan pada penyebaran wacana *good governance* dari World Bank dan relasi kekuasaannya dengan Amerika Serikat dan dunia internasional. Melalui penekanan Bank Dunia pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan fleksibilitas negara ketika berhadapan dengan gelombang pasar bebas, wacana good governance memberikan dukungan terhadap kompatibilitas antara perluasan arena pasar yang mengkondisikan demokratisasi.

Dalam banyak hal, diskursus demokrasi pasar bebas dan *good governance* ini menyembunyikan kepentingan kekuasaan yang ada didalamnya. Anne Mette Kjaer (2004; 177-180) membongkar pertautan kepentingan Amerika Serikat dan dunia internasional dalam diskursus good governance dari Bank Dunia. Menurut Kjaer, Amerika Serikat memiliki saham terbesar dalam sebesar 16,62%, diatas peringkat kedua yaitu Jerman yang memiliki saham kurang dari 5% untuk Bank Dunia. Dalam mekanisme pemilihan, Amerika Serikat secara efektif memiliki kekuasaan besar untuk memilih Presiden Bank Dunia dan ini memberikan kontribusi terbesar bagi International Development Agency (IDA) yang didanai oleh surplus IBRD dan anggota-anggotanya. Konfigurasi ini memungkinkan Amerika Serikat untuk memaksakan kepentingannya kepada Bank Dunia sebagai lembaga keuangan multilateral.

Menurut Kjaer ada pertukaran asimetris dalam konteks relasi antara Amerika Serikat dan dunia internasional dalam konteks mendorong globalisasi neoliberal. Mengingat Amerika Serikat memiliki kepentingan terhadap Bank Dunia untuk melakukan injeks kapital berupa pembukaan pasar, menggeser regulasi negara diwalayah ekonomi dan liberalisasi pasar modal. Kepentingan Amerika Serikat ini kemudian diselimuti oleh kepentingan untuk mendapatkan legitimasi agar Bank Dunia dipercaya sebagai lembaga keuangan multilateral. Hal itu dilakukan melalui upaya untuk mendorong wacana-wacana tentang "proteksi hati-hati" terhadap beberapa industri, upaya mereduksi kemiskinan dengan mengintegrasikan diri dengan pasar bebas, dan mempertahankan posisi negara dalam wilayah sosial-ekonomi. Dalam konteks ketegangan kepentingan ini Bank dunia kerapkali harus bertanggung jawan terhadap kepentingan pemilik saham terbesar yaitu Amerika Serikat dan kepentingan injeksi kapitalnya melalui program liberalisasi ekonomi. Uraian singkat tentang model *good governance* ala *World Bank* ini memberikan gambaran singkat bahwa tekanan globalisasi pasar bebas sebenarnya tidak bekerja untuk mendorong demokratisasi negara, namun lebih memfasilitasi perluasan mekanisme pasar bebas di negara-negara berkembang.

Selanjutnya seperti diuraikan oleh Huber, Rueschmeyer, dan Stephens (Comparative Politics 1997) dalam karyanya *The Paradoxes of Contemporary Democracy: Formal, Participatory and Social Dimensions* bahwa upaya untuk memperkuat kontrol demokratik rakyat terhadap kebijakan-kebijakan negara dalam arena sosial ekonomi membutuhkan perimbangan politik kelas dalam arena politik formal. Kapasitas organisasi buruh yang kuat baik dalam arena masyarakat sipil maupun partai politik menjadi deteminan utama yang mempengaruhi negara dapat bekerja untuk pemenuhan keadilan sosial dan kebijakan redistributif. Paradoksnya praktik demokrasi pasar bebas di Indonesia melemahkan kekuatan keseimbangan politik dari buruh dalam proses restrukturisasi ekonomi menuju pasar bebas. Kebijakan *outsourcing*, fleksibilitas tenaga kerja dan upah buruh yang rendah secara struktural melemahkan kekuatan buruh. Hal ini belum lagi ditopang oleh imbas kebijakan otoritarianisme Orde Baru yang membuat absen dinamika politik kelas di Indonesia.

Dalam konteks yang berbeda ekspansi globalisasi neoliberalisme seperti diuraikan oleh Mark Purcell (2008; 24-25) dalam *Recapturing Democracy: Neoliberalization and The Struggle for Alternatives Urban Futures*, bahwa globalisasi pasar bebas telah memiskinkan pratik-praktik politik demokrasi. Neoliberalisme bahkan mereduksi model demokrai liberal yang secara prinsipil bertanggung jawab kepada rakyat yang dipilih dengan menggesernya melalui prinsip deregulasi peran negara sehingga membuat pemerintah bertanggung jawan kepada kekuatan korporasi dan pasar daripada rakyat itu sendiri. Hal ini dapat membuka salah satu selubung manipulasi propaganda demokrasi liberal mainstream yang selalu menekankan pada aspek "memilih secara bebas" namun mengabaikan aspek "kontrol publik" sebagai landasan definisi demokrasi. Dalam konteks ini konfigurasi globalisasi neoliberal tidak memfasilitasi demokrasi dalam konteks penguatan kontrol demokratik dari warganegara, namun justru mendorong agar struktur ekonomi-politik bekerja untuk melayani kepentingan kapital.

Kesimpulan

Uraian secara panjang lebar tentang pengaruh ideologi neoliberalisme dalam diskursus demokrasi di Indonesia ini memberikan jalan kepada kita bagaimana kombinasi demokrasi liberal terbatas dan globalisasi neoliberal telah memiskinkan pemaknaan dan praktik politik demokrasi di Indonesia. Pembongkaran pradigmatik ini bukan untuk menunjukkan desain demokrasi liberal pasar bebas sebagai demokrasi palsu. Apabila kita memasuki argumen tentang kepalsuan tersebut, maka kita akan terjebak pada argumen esensialis dan mengikuti model propaganda ideologis dari kalangan proponen demokrasi-pasar bebas. Upaya pembongkaran mistifikasi demokrasi pasar bebas ini penting untuk memperlihatkan pemiskinan makna demokrasi dari gagasan tersebut dan membuka ruang-ruang pembacaan lain terhadap gagasan demokrasi yang lebih partisipatoris dan melibatkan kontrol demokratik yang lebih luas dari warganegara. Dalam konteks ini gagasan-gagasan republikanisme maupun sosialisme akan memberikan sumbangan besar bagi pemaknaan demokrasi yang lebih inklusif dan liberatif.

Referensi :

- Berlin, Isaiah. 1969. *Four Essay on Liberties*. Oxford: Oxford University Press.

- Berman, Sheri. 2006. The Primacy of Politics: Social Democracy and The Making of Europe Twentieth Century. Cambridge University Press.

- Beetham, David, 1999, Democracy and Human Rights. Cambridge, Polity Press.

- Dryzek, John S. 1996. *Democracy in Capitalist Times: ideals, Limits, and Struggles*. Oxford University Press.

-Derber, Charles et.al. 1995. *Whats Left? Radical Politics in the Post Communist Era.* Amherst & University of Massachussets Press.

-Dhont, Frank 2005. Nasionalisme Baru Intelektual Indonesia Tahun 1920-an. Gajah Mada University Press.

-Friedman, Thomas. 1999. The Lexus and The Olive Tree. Farrar, Strous& Giroux. New York.

-Fukuyama, Francis. 1992. The End of History: The Last Man. Hamish Hamilton London.

-Gramsci, Antonio. 1971. Selections from the Prisons Notebooks. Diterjemahkan Q. Hoare dan G. Nowell Smith. Lawrence & Wishart. London.

-Hatta. Muhammad. Ke Arah Indonesia Merdeka. Daulat Rakyat 1931 dalam Kumpulan Karangan I. Bulan Bintang. 1984.

- Harvey, David. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press.

-Hadi, Soraya.Et.al. 2007. Post Washington Consensus dan Politik Privatisasi di Indonesia. Marjin Kiri.

- Hadiz. Vedi R. 2005. Dinamika Kekuasaan: Ekonomi-Politik Indonesia Pasca Soeharto. LP3ES.

- Irwan, Alexander. 2005. Institutions, Discourse and Conflict in Economic Thought dalam Social Science and Power in Indonesia. Eds. Vedi R. Hadiz dan Daniel Dhakidae. Equinox dan ISEAS Singapore.

- Kjaer, Anne Mette. 2004. Governance. Polity Press.

-Lane. Max. 2007. Bangsa Yang Belum Selesai: Indonesia, Sebelum dan Sesudah Soeharto. Reform Institute Jakarta.
- Latif, Yudi. 2007. Revolusi Demokratik. Djambatan Jakarta.
- Liddle, R. William. Memperkuat Demokrasi Liberal. Forum Freedom 2006.
-Mayo, Marjorie. 2005. Global Citizens: Social Movements & The Challenge of Globalization. Zed Books Press London-New York.
-Mullard, Maurice. 2004. The Politics of Globalization and Polarization. Edward Edgar Publishing Limited UK.
- Mujani, Saiful. Demokrasi Bersama. Forum Freedom. 2006.
- Mallarangeng, Rizal 2005. Demokrasi dan Liberalisme. Freedom Forum.
- Mallarangeng, Rizal.2006. Diskusi Pro Kontra Liberalisme. Universitas Paramadina.
- Nozick, Robert. 1977. Anarchy, State and Utopia. Basic Books. New York.
-Putri, Agung. Demokrasi Menghadapi Krisis Demokrasi dalam Jurnal HAM dan Demokrasi. 2001. The Habibie Centre.
-Purcell. Mark. 2008. Recapturing Democracy: Neoliberalization and The Struggle for Alternative Urban Futures.
-Robinson. William I. 1996. Promoting Polyarchy: Globalization, US Intervention, and The Hegemony. Cambridge University Press.
- Steger. Manfred B. 2005. Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar. Lafadl Yogya.
- Soekarno, Lahirnya Pancasila. Edisi 2007 Galang Press.
- Shills, Edwards. 1960. The Intellectuals in The Political Development of The New States. World Politics.
-Wiratraman, R. Herlambang Perdana. 2007. Good Governance and legal Reform in Indonesia. Mahidol University.
- Wolin, Seldon, 1960, Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought. Boston. Little Brown.